

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdurrahman, S. d. (2005). *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adji, I. S. (2015). *Praperadilan & KUHAP (Catatan Mendatang)*. Jakarta: Diadit Media .
- Adji, O. S. (1980). *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Afiah, R. N. (1986). *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Atmasasmita, R. (1996). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Barda, N. A. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2011). *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- H.M.A., K. (2004). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika cetakan kedelapan.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika edisi kedua.
- Loekman, L. (1982). *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makaraao, M. T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Cetakan Kesatu.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Pangaribuan, L. M. (2000). *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Jakarta: Djambatan.

- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (1982).
Department Kehakiman Republik Indonesia.
- Prinst, D. (1989). Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan.
- Rasaid, M. N. (2003). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika Offset
Cetakan Ketiga.
- Ruslan, R. (2010). Metode Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- S.R.Sianturi. (2002). Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.
Jakarta: Storia Grafika.
- Setiono. (2010). Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta:
Pascasarjana UNS.
- Simanjuntak, N. (2009). Acara Pidana dalam Sirkus Hukum Indonesia. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
- Soedarto. (1977). Hukum Pidana cetakan 1. Bandung: alumni
- Soeparmono, R. (2003). Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti
Kerugian dalam KUHAP. Bandung: Mandar Maju.
- Syahrani, R. (2004). Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum.
Jakarta: Pustaka Kartini Cetakan Kesatu.
- Taufani, S. d. (2020). Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik.
Depok: Rajawali Pers.

Jurnal:

- Berutu, E. (2017). Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP
dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, vol.6, no.6,
2017, 85-86.
- Hikmoro, A. (2013). Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum
Pidana Di Indonesia. *Jurnal Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 1-2.
- Malarangeng, A. B. (2012). Solusi Praperadilan oleh Hakim Komisaris
Berdasarkan RUU KUHAP. *Pandecta. Volume 7. Nomor 1*.
- Mardjono, R. (2017). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex
Specialis*, vol. 11, 2.
- Muhaimin. (2016). Keberadaan Hakim Komisaris Dan Transparansi Dalam Proses
Penyidikan. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, vol. 16 no. 2, 225.

- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. *Badan Penerbit UNDIP*, 1-2.
- Napitulu, F. d. (2022). The Implementation of Article 77 KUHAP Regarding Status of Suspects in Pre-Trial Criminal Justice System in Indonesia. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*.
- Parikesit, I. (2017). Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6, Nomor 1, 20.
- Plangiten, M. (2013). Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Lex Crimen*, vol. II, no. 6, 33-34.
- S, K. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017). . *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol. 1 No. 1*, 81-94.
- Salahudin, N. A. (2019). Developing Integrity University Fovernance Model in Indonesia. *International Journal of Higher Education*, 185-199.
- Satyayudhadananjaya, N. (2014). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) dikaji dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian. *Vyavahara Duta vol. IX*, 88.
- Smith, T. (2022). The Practice of Pre-trial Detention in England & Wales - Changing Law and Changing Culture. *European Journal on Criminal Policy and Research*. 435-449.
- Supriyanta. (2009). KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Wacana Hukum*, vol. 8 No. 1, 1.
- Sutrisno, S. (2021). Pre-Trial in the Criminal Justice System in Military Criminal Judges in Indonesia. *International Journal of Business and Social Science Research*. 1-9 vol. 2, no.11.

Web:

Mahkamah Konstitusi, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_PUU-XII_2014, Diakses pada 27 September 2022

<https://klikhukum.id/curkum-93-pengertian-penangkapan-dan-penahanan/> diakses pada 2 Oktober 2022

<https://jendelahukum.com/prosedur-penangkapan-menurut-kuhap/> diakses Pada 2 Oktober 2022

<https://sinarpolitan.com/2022/05/31/penangkapan-dilakukan-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/> Diakses pada 2 Oktober 2022

<http://icjrid.files.wordpress.com/2012/12/r-kuhap.pdf>, diakses 17 Januari 2022